

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Dorong Program Hunian DP 0 Rupiah Dihapus

Gambir, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta mendorong program hunian DP 0 Rupiah warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihapus. Hunian itu dianggap gagal, karena masih banyak unit yang belum terjual.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menilai, program hunian DP 0 rupiah tidak berguna. Program itu kurang diminati dengan berbagai alasan, mulai dari pemohon tak lolos verifikasi berkas hingga cicilan yang lebih besar dari tarif Rusunawa.

"Jangan buang-buang uang rakyat. Kalau sudah masa DP 0 rupiah tidak ada hasilnya, sudahlah dicoret saja," kata August saat rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta pada Selasa (11/7/2023).

Menurut August, program DP 0 rupiah tidak menjawab permasalahan masyarakat yang ingin punya hunian layak. Malahan, kata Agus, program ini membuat warga memanfaatkan situasi dengan menyewakan unit kepada orang lain seperti yang terjadi apartemen kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Dia pun menyoroti pembuatan rumah hunian DP 0 rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur yang dinilai kurang efektif. Karena itulah, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini meminta hunian yang sebelumnya dijadikan DP 0 rupiah dijadikan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa).

"DP 0 kalau memang bentuknya rusun, yah jadikan rusun saja karena masih banyak warga ekonomi sulit dipaksakan ber-Dp 0 rupiah," imbuhnya.

Tarik Penugasan

Senada ditungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta

Ida Mahmuda. Perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini mendorong Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi program DP 0 Rupiah.

Kata dia, pembangunan hunian tersebut merupakan penugasan dari Pemerintah DKI kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Dia berharap, Heru memaksimalkan penyediaan Rusunawa dibanding melanjutkan program hunian DP 0 Rupiah.

"Kami selalu minta kepada Pak Gubernur agar penugasan itu dievaluasi. Selama belum dievaluasi maka BUMD akan berpikiran akan terus melaksanakan tugas itu," ujarnya.

Kata Ida, publik juga sudah tahu bahwa program ini sulit didapat masyarakat. Dari ribuan pemohon, hanya ratusan orang yang mendapatkan hunian tersebut karena tidak lolos verifikasi dokumen.

"Karena memang banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan kedua warga Jakarta lebih membutuhkan Rusunawa kok dibandingkan DP 0 Rupiah itu," katanya.

Ida juga mendorong agar Heru segera menarik penugasan pembangunan hunian tersebut dari Perumda Sarana Jaya. Ida menganggap proyek tersebut tidak layak dan gagal untuk dirasakan masyarakat Jakarta.

"Sekali lagi saya harap Pak Pj Gubernur mengevaluasi dan mencabut penugasan ini, tapi kalau sudah ada sebaiknya buat Rusunawa saja, kalau pembangunannya kemarin itu memakai penyertaan modal daerah (PMD), duit kita juga kan," jelasnya.

"Mereka boleh saja bangun, nanti pengelolaannya di DPRKP. Kalau pemerintah selama ini kan subsidi (tarif) kepada masyarakat dan mereka memang butuh yah kenapa tidak?" paparnya. (faf)